

LABOR CONTRACT

KIK  
Per 46/00  
Kus  
P

**SKRIPSI**

**ROESDIANA HARI KUSUMA**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
TERHADAP PEKERJA KONTRAK**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

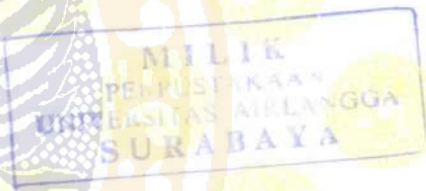
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

# PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA KONTRAK

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing,

Dr. Maarten Leendert Souhoka, S.H., MS.  
NIP. 130 873 453

Penyusun,

Roesdiana Hari Kusuma  
NIM. 039514103

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Pemerintah telah berusaha untuk melindungi para pekerja kontrak. Hal ini terbukti dengan adanya kebijaksanaan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja kontrak, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berawal dari pelanggaran kesepakatan kerja waktu tertentu. Namun demikian masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ketentuan jangka waktu kontrak dan perpanjangan kesepakatan kerja.
- b. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di PT. Bank Ciputra pada mulanya dilakukan tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan para pekerja kontrak atau Serikat Pekerja. Sehingga hal ini menimbulkan perselisihan antara PT. Bank Ciputra dengan kesembilan belas pekerja kontrak dalam menentukan hak-hak yang harus diterima oleh pekerja kontrak. Untuk menyelesaikannya, maka pihak pengusaha menyerahkan permasalahan tersebut kepada pegawai perantara. Dalam menangani masalah tersebut pegawai perantara menganjurkan agar para pekerja kontrak menerima apa yang ditawarkan oleh PT. Bank Ciputra yang berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan pasal 21, uang jasa dan ganti kerugian sesuai ketentuan

pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1996, gaji sampai dengan bulan Desember 1998, tunjangan hari raya dan tambahan kebijaksanaan sebesar dua bulan gaji.

## 2. Saran

- a. Sebaiknya perlu dibentuk suatu lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang berkedudukan di bawah koordinasi Departemen Tenaga Kerja. Hal ini untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berawal dari pelanggaran kesepakatan kerja waktu tertentu.
- b. Hendaknya dalam memutuskan hubungan kerja, pengusaha harus merundingkan terlebih dahulu maksudnya dengan Serikat Pekerja atau dengan pekerja sendiri, jika dalam perusahaan itu belum ada Serikat Pekerja. Tahap perundingan ini sangat penting sebab dengan adanya perundingan terlebih dahulu, maka kepentingan para pihak dapat lebih diperhatikan sehingga masing-masing pihak tidak akan merasa dirugikan dengan adanya pemutusan hubungan kerja tersebut.

